

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Tengah, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama adalah pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa penerimaan PAD yang sedikit mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berasal dari pendapatan daerah lain-lain yang sah dan dilakukan efisiensi belanja operasional sehingga, pemerintah daerah menghasilkan PAD yang sedikit tidak bermasalah untuk meningkatkan belanja operasionalnya.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua adalah dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa penerimaan dana perimbangan yang sedikit mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berasal dari pendapatan daerah lain-lain yang sah dan penerimaan dana perimbangan yang sedikit menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten

di Provinsi Jawa Tengah tidak terlalu bergantung terhadap pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dapat menjalankan kegiatan ekonominya secara mandiri.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga adalah belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa pengeluaran belanja modal yang sedikit mempengaruhi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dapat terjadi karena pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan dana nya untuk belanja operasional sehingga pengeluaran belanja modal yang sedikit dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan catatan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Berikut rinciannya:

Keterbatasan data yang ada berdistribusi tidak normal karena data terlalu ekstrem sehingga terjadi hasil tidak normal saat di lakukan pengujian uji normalitas menggunakan SPSS 25 .

## **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang disampaikan diatas, Adapun saran untuk penelitian masa depan :

Disarankan untuk peneliti di masa depan dapat menggunakan beberapa Provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan memilih sampel datanya menggunakan kota di semua Provinsi di Pulau Jawa agar datanya tidak ekstrem.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim & Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi. Salemba Empat. Jakarta
- Abdul Halim. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(3), 32-41
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research–Vol*, 1(1), 10-21580.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah , (2022). Statistik Indonesia Tahun 2022. Jakarta Pusat. Badan Pusat Statistik
- Bustani, B., Khaddafi, M., & Ilham, R. N. (2022). Regional Financial Management System of Regency/City Regional Original Income In Aceh Province Period Year 2016-2020. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 2(3), 459-468.
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1989. CEO governance and shareholder returns. Agency theory or stewardship theory. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management. Washington,
- DC. Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship theory or agency theory. CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2019). Tentang Pemerintah daerah <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. diakses tanggal 20 Oktober 2023.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Salemba Empat. Jakarta.
- Hanief, Yulingga Nanda dan Wasis Himawanto. (2017). Statistik Pendidikan. Deepublish. Yogyakarta.

- Mahsun., dkk. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016). Buku Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UII Press. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016 b). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Penerbit STIM YPKN.
- Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mursyidi. (2013). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung.
- Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan perundang-undangan 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap
- Permendagri nomor 21 tahun 2011 Tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- Permatasari, D. A., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573-1582.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Ramlah, R., Sjarlis, S., & Sultan, M. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Kota Makassar. *Gendhera Buana Jurnal (GBJ)*, 1(3), 305-318.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Doctoral dissertation, Udayana University)..
- Sangin, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kantor Bpkad Kota Palopo) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).
- Sri, L., & Suyana, U. M. (2019). The Effect Of Local Government Own Revenue And Revenue Sharing Funds On Economic Performance And Community Welfare

Through Capital Expenditure Of Regency/City In Bali Province, Indonesia. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 91(7), 67-87.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta. Bandung.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 159 Tentang Dana Perimbangan

Undang-undang No. 13 Tahun 2005 Tentang Belanja Modal

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 Tentang Keuangan Negara